

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbincangan mengenai pembangunan baik dalam perspektif teoritisnya maupun praksisnya seakan tak pernah berhenti. Hal itu terjadi seiring dengan denyut nadi pembangunan yang tak kunjung usai atau bahkan tak akan pernah usai. Dalam dua dasawarsa terakhir, pembangunan dalam bahasanya Fikih (2009) sebagaimana dikutip oleh Nur Sayyid Santoso Kristeva dalam bukunya *Kapitalisme, Negara Dan Masyarakat* membahasakan bahwa pembangunan telah menjadi semacam “agama baru” ataupun ideologi baru bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Pembangunan menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan dalam nasib kehidupan mereka.¹ Konsekuensinya jelas, Semua negara dunia termasuk negara-negara yang sedang berkembang berlomba-lomba mengejar kemajuan dengan membangun negara-negara mereka dan memperbaiki kondisi rakyat mereka demi terwujudnya *bonum commune*. Pembahasan tentang pembangunan sebagai upaya merubah keadaan masyarakat memuat persoalan bagaimana menciptakan keadaan yang sudah ada menjadi keadaan yang lebih baik mengingat pembangunan sebagai suatu proses multidimensi yang tidak hanya berupa sebuah tujuan dari tindakan rasional dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial, tetapi pembangunan pun bertalian erat dengan berbagai harapan yang menyelamatkan dan membebaskan.

Pergulatan intelektual terasa semakin hangat ketika kerangka konseptual yang mengikuti kaidah-kaidah konvensional yang tidak lain merupakan replikasi pembangunan model barat pada realitanya banyak menemui kebuntuan di lapangan. Dalam perjalanan waktu, konsep-konsep pembangunan model barat tersebut setelah diimplementasikan di banyak negara Dunia Ketiga justru tidak sedikit yang menghasilkan paradoks-paradoks pembangunan yang sangat mungkin tidak bisa

¹ Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A, *Kapitalisme, Negara Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 60.

diprediksi dan tidak terkontrol dengan bobot kompleksitas permasalahan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Dewasa ini, Dunia Ketiga mengalami krisis yang sangat hebat akibat gagalnya proyek yang dinamakan pembangunan. Kemiskinan, kelaparan, penindasan, ketidakbebasan, kerusakan ekologis serta penderitaan adalah sederet persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama, terutama masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan mutlak.

Dua dasawarsa pembangunan yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.² Soedjatmoko dalam lokakarya mengenai pembangunan menegaskan:

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pembangunan yang dijalankan di Dunia Ketiga selama beberapa dasawarsa terakhir yang sebagian besarnya menerapkan model-model yang disodorkan dari barat mendapat banyak kritik, yang mengharuskan suatu pemikiran ulang yang sungguh-sungguh menyeluruh, mulai dari yang bercorak reformatif hingga ke yang berwatak radikal.³

Lantas mengapa persoalan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menuai banyak kritik? Apakah yang salah dengan konsep pembangunan? Apa indikator untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu pembangunan? *De facto*, diskusi tentang pembangunan akan berhadapan dengan suatu kendala yang oleh Johannes

² Laporan tersebut merupakan laporan yang dikutip oleh Dr. Johannes Müller dari Komis Utara-Selatan yang diketuai oleh Willy Brandt pada tahun 1980 yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara Industri dan negara berkembang. Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia (Etika Politik dan Perubahan Sosial)*, penerj. A. Rahman Toleng (Jakarta: Penerbit LP3S, 1982), hal. vii.

³ Soedjatmoko, *Pembangunan Berkelanjutan Mencari Format Politik*, ed. Yayasan SPES (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. ix.

Müller menyebutnya dengan memilih titik tolak yang tepat.⁴ Banyaknya kritikan atas pembangunan disebabkan oleh suatu pergeseraan paradigma aktivitas.⁵

Mirip dengan gagasan Thomas Kuhn tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi melalui pergeseran paradigma aktivitas ilmiah, konsep pembangunan-pun tengah mengalami perubahan-perubahan besar yang boleh disebut sebagai *paradigm shift* (pergeseran paradigma). Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai kaca mata atau alat pandang.⁶ Term paradigma sebagai sudut pandang dapat mempengaruhi sikap dan penglihatan subjek terhadap objek yang diamati. Paradigma juga akan mempengaruhi sikap atau tindakan seseorang terhadap suatu persoalan. Term paradigma menjadi sangat terkenal setelah Thomas Kuhn menulis karyannya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*.⁷ Paradigma menurut Kuhn adalah adalah model-baku yang telah lama diterima dan dijadikan sebagai acuan oleh satu paguyuban (masyarakat) ilmiah dalam memahami, menilai, merumuskan, dan memecahkan persolan yang dihadapi. Bila model baku itu terbukti tidak efektif lagi sebagai acuan untuk menangani persoalan-persoalan baru, maka terjadi krisis kepercayaan terhadapnya dan masyarakat akan menemukan paradigma baru yang lebih efektif sebagai acuan untuk memahami, menilai, merumuskan dan memecahkan persoalan-persoalan baru itu.

Dalam hubungan dengan pembangunan, paradigma pembangunan berarti acuan, referensi atau titik tolak sebuah teori dan kebijakan pembangunan. Sebuah teori dan kebijakan pembangunan lahir dari suatu paradigma tertentu yang kemudian akan mempengaruhi dalam memahami, menilai, merumuskan kebijakan politik

⁴ Johannes Müller, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 1.

⁵ Pergeseran paradigma aktivitas yang penulis maksud adalah bahwa paradigma pembangunan yang pada mulanya merupakan model yang efektif sebagai acuan dalam memahami, menilai, merumuskan dan memecahkan persoalan-persoalan dalam pembangunan ternyata tidak efektif lagi. Oleh karena itu, masyarakat ilmiah mengalami krisis kepercayaan dan berusaha untuk mencari model baru yang lebih efektif.

⁶ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.18.

⁷ *Ibid.*

pembangunan tersebut. Posisi paradigma dalam pembangunan adalah dasar untuk menilai, merumuskan serta melihat faktum pembangunan yang terjadi dalam kehidupan bernegara.

Dalam masyarakat Dunia Ketiga, pembangunan yang menjadi acuan tindakan, pemahaman, penilaian, perumusan, dan pemecahan-pemecahan persoalan yang diterima secara umum oleh masyarakat atau negara Dunia Ketiga tidak lagi memberikan hasil yang memuaskan (jauh dari fajar cerah) dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persolan baru yang muncul. Hal ini disebabkan adanya dominasi suatu paradigma terhadap paradigma yang lain.⁸ Hemat penulis, salah satu paradigma yang dominan dalam diskursus tentang politik pembangunan, khususnya pada masa ini di negara-negara yang getol dalam pembangunan adalah paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Pendapatan Nasional Per kapita (GNP per kapita).

Paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi melihat sebuah masyarakat atau negara berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut cukup tinggi.⁹ Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan kriteria utama yang dominan bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Dalam konteks tersebut, paradigma pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada dimensi ekonomi (pendapatan) dan *profit* atau keuntungan, oleh sebab, selain pertumbuhan sebagai sasaran yang paling tepat, juga dalam konsep strategi itu tersimpan anggapan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi itu pada akhirnya kue pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah dan terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan demikian,

⁸ Dominasi paradigma dalam pengertian bukan dalam urusan benar salah bahwa paradigma yang menang akan memenangkan paradigma yang lain. Ritzer (1975) sebagaimana dikutip oleh Fakih mengungkapkan bahwa kemenangan suatu paradigma atas paradigma yang lain lebih disebabkan karena para pendukung paradigma yang menang itu lebih memilih kekuatan dan kekuasaan (*power*) dari pengikut paradigma yang dikalahkan, dan sekali lagi bukan karena paradigma yang menang tersebut lebih benar atau lebih baik dari yang dikalahkan. *Ibid.*, hal. 20.

⁹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 2.

yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.¹⁰

Namun, paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi menuai kritikan karena beberapa keterbatasan sebagaimana ditekankan oleh Bank Dunia sendiri (*World Bank*) yang dikutip oleh Müller ‘GNP per kapita adalah tolak-ukur yang bermanfaat sebagai informasi tentang produktivitas ekonomi rata-rata, tetapi baik kemakmuran maupun keberhasilan proses perkembangan masyarakatnya tidak bisa diukur’.¹¹ Indikator yang paling laris untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu negara adalah produk kotor nasional per kapita GNP (*Gross National Product*), adalah ‘seluruh produksi, baik dalam maupun luar negeri, yang menjadi milik penduduk sebuah negara’. Namun, Produk Kotor Nasional per Kapita sebagai indikator kemajuan sebuah negara memiliki beberapa keterbatasan sebagaimana yang ditekankan oleh Bank Dunia yang dikutip oleh Müller.¹² *Pertama*, bermanfaat sebagai informasi tentang produktivitas ekonomi rata-rata, namun tidak memuat informasi tentang komposisi, jenis, dan daya guna barang dan jasa, serta mengesampingkan segi-segi mutu kehidupan yang hampir mustahil disediakan oleh ekonomi. *Kedua*, GNP per Kapita tidak memperhatikan efek-efek eksternal yang negatif, misalnya biaya-biaya sosial (derita manusia akibat pembangunan) atau kerusakan ekologis.

Ketiga, selain itu indikator ini tidak bisa menampung hasil kegiatan yang tidak bisa diukur dengan uang dan karena itu tidak muncul di pasar resmi, misalnya pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak, atau produksi subsistensi (untuk konsumsi sendiri). *Keempat*, GNP tidak mengatakan apapun tentang pembagian pendapatan riil dan tentang luasnya kemiskinan mutlak. Oleh karena itu GNP per

¹⁰ Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB atau *Gross National Product*, *GNP*) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau *Gross Domestic Product*, *GDP*). PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara (dalam arti jumlah penduduknya) berlainan, untuk bisa membandingkan, dipakai ukuran PNB/Kapita atau PDB/Kapita. Dengan itu, dapat dilihat produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan. *Ibid.*, hal. 3.

¹¹ Johannes Müller, *op. cit.*, hal. 20-22.

¹² *Ibid.*

kapita berguna sebagai indikator kemampuan, bukan sebagai sinonim untuk pembangunan. Pertumbuhan produk atau pendapatan nasional merupakan suatu syarat yang diperlukan, tetapi sama sekali tidak memadai untuk mengentas kemiskinan. *Kelima*, indikator pendapatan nasional sekurang-kurangnya di negara-negara yang amat miskin merupakan suatu syarat yang diperlukan, tetapi sama sekali tidak memadai untuk mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan yang dijalankan di negara-negara Dunia Ketiga dengan paradigma pertumbuhan ekonomi selalu melahirkan penderitaan bagi manusia. Hal ini muncul, lantaran negara-negara Dunia Ketiga amat getol memperjuangkan pendapatan ekonomi atau produktivitas negara, sementara nilai kebebasan manusia atau apa yang disebut perhitungan “biaya-biaya manusia” diabaikan. Konsekwensinya, manusia ditempatkan bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek pembangunan. Hal ini sangat tampak dalam ideologi pembangunan kapitalisme dan sosialisme yang kemudian mendapat kritikan.

Kritik “ideologi” pembangunan cukup lama mendapat sorotan sejak era 1970-an. Cukup banyak bermunculan kritik terhadap model-model teori ideologi pembangunan dari para pemikir sosial dan cendekiawan termasyur tiga dasawarsa terakhir pada abad ke 20. Sindhunata dalam bukunya *Dilema Usaha Manusia Rasional*¹³ mengemukakan:

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kini banyak dilontarkan kritik terhadap teori-teori pembangunan yang pernah ada atau sedang diterapkan di negara-negara berkembang. Munculnya pemikir-pemikir baru seperti Gunnar Myrdal, P. L. Berger, P. Freire, E. F. Schumacher, pemikir-pemikir yang masih meraba-raba dalam mencari teori pembangunan untuk tiga dasawarsa terakhir ini sangat laku di negara berkembang.

Dalam studi ini, penulis mengemukakan kritik Peter. L. Berger terhadap dua ideologi pembangunan yakni kapitalisme dan sosialisme. Kritik Beger berkenaan

¹³ Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hal. 146.

dengan persoalan apakah sosialisme atau kapitalisme, atau perpaduan dari keduanya merupakan cara tercepat dan teraman untuk ke luar dari kemiskinan dan ketertinggalan serta ketidakbebasan. Ataukah kedua-duanya merupakan sistem pembangunan yang bercorak antropologis (Filsafat Manusia)¹⁴ dalam arti tetap memperhitungkan biaya-biaya manusia?

Model pembangunan baik kapitalisme maupun sosialisme kalau menyangkut perubahan sosial termasuk pembangunan Dunia Ketiga selalu didasari oleh dua mitos yang dominan yakni mitos pertumbuhan dan mitos revolusi. Ide pertumbuhan dalam ideologi kapitalisme dan ide revolusi dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai mitos.¹⁵ Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tidak ada bukti sama sekali.¹⁶ Kedua model pembangunan tersebut menuntut ongkos manusianya sendiri, penderitaan manusianya sendiri. Meskipun kedua model sebagaimana yang diterapkan di Brasil dan Cina tersebut harus ditolak, secara teoretis keduanya dapat diperbaiki.

Di satu pihak, model kapitalisme yang dilandaskan pada ide pertumbuhan ekonomi tidak jarang melahirkan dan menuntut pengorbanan yang tinggi. Di sini terbersit anggapan bahwa pertumbuhan yang tinggi menjamin pencapaian masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, persaingan pun ditekankan. Pertumbuhan dan kebebasan dalam masyarakat tercapai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan dalam masyarakat terus terjadi. Yang kuat akan menang dan menikmati kue pertumbuhan, sedangkan yang lemah tidak memiliki

¹⁴ Refleksi ini dikemukakan oleh Müller yang merupakan ciri-ciri khas etika politik perkembangan masyarakat. Dari sana diturunkan tuntutan etis umum bahwa: titik pangkal dan tujuan segala kebijakan dan upaya politik seharusnya adalah manusia yang tidak boleh diperalat demi tujuan lain atau kepentingan ideologi. Johannes Müller, *op. cit.*, hal. 168.

¹⁵ Mitos sebagaimana dikutip Müller merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu fideisme yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi. Peter. L. Berger, *Piramida Kurban Manusia*, *op. cit.*, hal. xi.

¹⁶ Johannes Müller dalam pengantarnya ke dalam buku *Piramida Kurban Manusia* karangan Peter L. Berger. *Ibid.*, hal. x.

kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di banyak negara Dunia Ketiga, polarisasi dalam pembagian pendapatan dan kekayaan semakin meningkat. Dewasa ini pun kelaparan dan penyakit lebih banyak daripada beberapa dasawarsa yang lalu bahkan pengangguran dan setengah pengangguran semakin meningkat.¹⁷

Di pihak lain, model sosialisme mengandung suatu kecenderungan inheren ke arah totalitarianisme karena alasan yang sederhana: sosialisme pada dasarnya akan berusaha untuk menyerap perekonomian dalam negara, dan dengan demikian sangat meningkatkan potensi totaliter yang terakhir ini. Karena itu, tidak mengejutkan kalau melihat bahwa di banyak negara sosialis, termasuk negara-negara di Dunia Ketiga yang menggunakan model pembangunan sosialis, teror digunakan sebagai alat politik yang “sah”.¹⁸ Model pembangunan seperti ini mau tidak mau menimbulkan korban, khususnya korban manusia. Berhadapan dengan model tersebut, Berger tidak mengajurkan opsi mana yang mau dipakai di Dunia Ketiga. Keduanya secara moral tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, model yang ideal adalah model yang sedikit menimbulkan korban atau memperhitungkan biaya biaya manusiawi.

Persoalan-persoalan dalam pembangunan menuntut suatu pemecahan. Pemecahan atas krisis-krisis pembangunan menuntut pemecahan etis dalam matra etika politik baik pada tataran penghayatan konkret maupun pada tataran refleksi teoritis. Masalah-masalah pembangunan akan menghadapkan individu sebagai makhluk yang manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik tersebut?¹⁹

Berhadapan dengan pilihan etis seperti itu, maka seluruh kebijakan dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan untuk mengatasi atau paling tidak, mengurangi

¹⁷ *Ibid.*, hal .47.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 86-87.

¹⁹ *Ibid.*, hal. viii.

sedapat mungkin penderitaan manusia dalam semua bentuk dan dimensinya.²⁰ Karena itu, Berger mengemukakan bahwa dua kata kunci yang harus diperhatikan dalam kebijakan dan upaya pembangunan yakni Kalkulus penderitaan (*Calculus of pain*) dan kalkulus makna (*calculus of Meaning*). Yang pertama merujuk pada gagasan bahwa penderitaan manusia dengan titik tolak yang bersifat negatif²¹ (kematian, ketakutan, penderitaan) tidak boleh dipertaruhkan untuk “mencapai pertumbuhan masa depan” atau janji masyarakat komunistik. Yang harus diperhitungkan dalam upaya dan kebijakan pembangunan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk penderitaan yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Jadi pembangunan hendaknya bertitik tolak pada segala apa yang dialami sebagai penderitaan.

Yang kedua merujuk pada kebutuhan akan makna. Kebutuhan itu memiliki pengandaian nilai yang sederhana bahwa manusia berhak hidup dalam sebuah dunia yang mengandung makna.²² Kebutuhan akan makna merupakan hal esensial bagi setiap manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Berger bahwa “manusia tidak cukup hanya hidup dengan roti”.²³ Sebab manusia membutuhkan kerangka orientasi yang mengarahkan hidupnya. Kerangka orientasi tersebut selalu merupakan hasil usaha kolektif dalam memaknakan kenyataan yang dihadapi. Dalam hubungan dengan perhitungan makna, Berger berpendapat bahwa agama memiliki peranan penting. Kebutuhan manusia atas hidup yang bermakna mempunyai implikasi yang sangat penting tentang partisipasi kognitif untuk menafsir dan memaknakan dunia kenyataan yang dihadapi. Posisi Berger dalam kritiknya selalu mempertanyakan model kapitalisme dan sosialisme. Baginya, upaya dan kebijakan pembangunan

²⁰ Semua tujuan lebih lanjut dan terperinci harus dijabarkan dan didalilkan berdasarkan pengertian integral itu. Dengan demikian akan diperoleh tolak-ukur mendasar untuk menilai segala upaya pembangunan. Johannes Müller, *op. cit.*, hal. 162.

²¹ Tolak ukur yang bersifat negatif ini merupakan ciri khas dalam pendekatan etika politik Peter L. Berger. Negatif dalam arti bahwa Berger dalam etika politiknya tidak bertitik tolak dari hal-hal yang positif atau hal-hal yang diperoleh melalui pengandaian-pengandaian rasional (*apriori*), tetapi dari apa yang dirasakan sebagai yang negatif (*aposteriori*) dan karena itu tidak bisa diterima. Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia*, *op. cit.*, hal. xiv.

²² *Ibid.*, hal. 168.

²³ *Ibid.*, hal. 169.

seharusnya mengurangi sedapat mungkin penderitaan manusia dalam semua bentuk dan dimensinya.

Bertolak dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengelaborasi gagasan pembangunan Peter L. Berger di bawah judul; **KRITIK PETER L. BERGER TERHADAP IDEOLOGI KAPITALISME DAN SOSIALISME DAN KONSEKUENSINYA BAGI PEMAHAMAN YANG REALISTIS TENTANG PEMBANGUNAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang hendak dikaji dalam tulisan ini berangkat dari persoalan manakah cacat dari konsep pembangunan dalam kapitalisme dan sosialisme menurut Berger? Masalah pokok itu akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Siapa itu Peter L. Berger?
2. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan dalam dua ideologi?
3. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan menurut Peter L. Berger?
4. Apa sumbangsih atau peran agama dalam pembangunan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan penulisan karya ilmiah ini.

Pertama, tujuan umum. Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini adalah menjelaskan kritik Peter L. Berger terhadap ideologi kapitalisme dan sosialisme dan konsekuensinya bagi pemahaman yang realistis tentang pembangunan.

Kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai salah satu prasyarat mencapai gelar Sarjana Filsafat pada Institut Filsafat dan

Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Selain itu, karya ilmiah ini merupakan salah satu media bagi penulis untuk menuangkan gagasan-gagasan berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan politik. Hal ini juga berkaitan posisi penulis sebagai seorang mahasiswa Filsafat, yang dituntut untuk mengembangkan kemampuan menganalisis, berpikir kritis dan menulis secara baik. Dengan demikian, karya ilmiah ini merupakan salah satu upaya penulis mengembangkan ketiga potensi tersebut.

Adapun manfaat dari penulisan karya ini adalah:

Bagi pemerintah, agar lebih bijak dan rasional serta lebih memperhitungkan biaya-biaya manusiawi dalam menyusun, membuat dan merumuskan konsep dan pembangunan yang berwajah manusiawi.

Kedua, bagi masyarakat, agar mampu memposisikan diri dan bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Ketiga, bagi akademisi, pemerhati sosial dan pelajar, agar mampu mengembangkan ide, gagasan dan konsep pembangunan berwajah manusiawi sebagaimana yang telah dimulai oleh Peter L. Berger.

1.4. Metode Penelitian

Dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis data-data sekunder dari buku, majalah, jurnal-jurnal akademik, koran dan beberapa media online. *Pertama*, penulis mencari teori pembangunan dan masalah pembangunan (Kapitalisme dan Sosialisme) di negara-negara Dunia Ketiga. *Kedua*, mencari dan membaca karya-karya Berger tentang pembangunan sebagai acuan teoritis untuk membedah masalah tersebut. *Ketiga*, menampilkan data-data tersebut sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di IFTK Ledalero.

1.5. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari 5 Bab. Pada Bab I dijabarkan latar belakang pemilihan judul tulisan. Pada bab ini, penulis menjelaskan pembangunan sebagai upaya mengatasi masalah-masalah sosial berangkat dari paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang dijalankan di negara-negara Dunia Ketiga selalu berhadapan dengan dua kontras ekstrem yakni pertumbuhan ekonomi dan penderitaan manusia. Paradigma pertumbuhan menekankan keuntungan atau profit dan mengabaikan biaya-biaya manusiawi. Hal ini tampak dalam kapitalisme dan sosialisme. Dua kontras ekstrem ini muncul lantaran negara-negara Dunia Ketiga amat getol memperjuangkan pendapatan ekonomi atau produktivitas negara, sementara nilai kebebasan manusia atau apa yang disebut perhitungan “biaya-biaya manusia” diabaikan. Akibatnya manusia ditempatkan bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan konsep pembangunan menurut Peter L. Berger sebagai alternatif. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan masalah pokok, tujuan, manfaat, metode dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis secara garis besar menampilkan biografi intelektual Peter L. Berger, kritik Berger terhadap pembangunan dalam ideologi kapitalisme dan sosialisme serta menampilkan diskursus dan teori-teori pembangunan dalam dua ideologi. Pada Bab ini diuraikan dua ideologi dominan dalam pembangunan, yakni Kapitalisme dengan ide “Pertumbuhan” dan Sosialisme dengan ide “Revolusi”. Kedua ideologi memiliki kelemahan mendasar dalam praksisnya untuk pembangunan di Dunia Ketiga. Baik kapitalisme maupun sosialisme sama-sama tidak memperhitungkan biaya-biaya manusiawi yang menekan yakni penderitaan baik penderitaan fisik maupun psikis (kognitif). Karena itu, kedua paradigma tersebut perlu dipertimbangkan lagi dengan membuka diskursus paradigma pembangunan yang memperhitungkan biaya-biaya manusiawi atau paradigma pembangunan yang membebaskan.

Pada Bab III, penulis menjelaskan konsep pembangunan menurut Peter L. Berger. Menurut Berger, pembangunan adalah upaya untuk membebaskan manusia dari derita. Konsep pembangunan tersebut tidak terlepas dari refleksi Berger atas penderitaan manusia di Dunia Ketiga sebagai dampak dari pembangunan kapitalisme dan sosialisme di negara Dunia Ketiga. Penderitaan itu seperti kemiskinan, kelaparan, ketidakbebasan, penindasan. Gagasan Berger tersebut memiliki kesamaan dengan pemikir lain seperti Amartya Sen. Sen mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk memperluas kebebasan dan kapabilitas manusia.

Pada Bab IV, penulis menjelaskan peran dan posisi agama dalam pembangunan. Bab ini dimulai dengan pertanyaan sejauh mana agama berperan dalam usaha membebaskan manusia dari penderitaan mengingat agama bersifat ambivalen. Menurut Berger, agama memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan kerangka orientasi yang mengartikan dan mengarahkan seluruh hidup dan kerja manusia. Kerangka orientasi tersebut pada umumnya ditemukan dalam kebudayaan manusiawi, yaitu hasil usaha kolektif suatu masyarakat sepanjang sejarahnya untuk memaknakan kenyataan yang dihadapi dan dialami, baik dengan manafsir maupun dengan mengolahnya. Selanjutnya, pada Bab V yang berisi kesimpulan dan catatan kritis atas seluruh pembahasan pada bagian sebelumnya.